

Peran Dunia Islam dalam Membangun Perdamaian Global Perspektif Hubungan Internasional

The Role of the Islamic World in Building Global Peace from an International Relations Perspective

Aris Munandar^{1*}, Endang Susanti²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

arism2365@gmail.com*

Diterima 21 Agustus 2025 | Direvisi 24 Agustus 2025 | Diterbitkan 31 Agustus 2025

ABSTRACT

Islam and peace are two terminologies that are interrelated with each other because Islam is the religion of rahmatan lil 'alamin. So, it has become necessary for Muslims to contribute in realizing and maintaining world peace actively. This paper aims to analyze the role of political Islam in maintaining peace in the international world. Political Islam as an active subject in global peace in this article is divided into three levels, namely individual, state, and global. The conceptual approach analytical of these three levels is drawn from the International Relations studies. For the individual level, the Nobel Peace Prize can be used as a benchmark for analysis, because the award is an international recognition. At the country-level, this article takes as an example the role of Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world. While at the global level, several organizations such as the Organization of Islamic Cooperation (OIC), the Arab League, and the Muslim World League became representative organizations to see the extent of the role of political Islam in maintaining world peace.

Keywords: *Islamic World, Muslim World League, OIC, Peace, Political Islam*

ABSTRAK

Islam dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya, karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Sehingga sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam untuk berkontribusi aktif dalam upaya mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia. Makalah ini bertujuan menganalisis peran politik Islam dalam kontribusi perdamaian di dunia internasional. Politik Islam sebagai subjek aktif dalam perdamaian global di artikel ini dibagi pada tiga tingkatan, yaitu individual, negara, dan global. Pendekatan konseptual analisis terhadap tiga tingkatan ini diambil dari kajian Ilmu Hubungan Internasional. Untuk tingkatan individual, Penghargaan Nobel Perdamaian dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur analisis, karena penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional. Pada tingkatan negara, artikel ini mengambil contoh peran Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sedangkan pada tingkatan

terakhir yaitu global, beberapa organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Liga Muslim Dunia menjadi organisasi yang representatif untuk melihat sejauh mana peran politik Islam dalam memelihara perdamaian dunia.

Kata kunci: *Dunia Islam, Liga Muslim Dunia, OKI, Perdamaian, Politik Islam*

PENDAHULUAN

Islam sejak awal kemunculannya telah dikenal sebagai agama yang membawa misi perdamaian. Secara etimologis, istilah *Islam* berasal dari kata kerja *salima yaslamu salāman salāmatan* yang bermakna berserah diri, selamat, sejahtera, damai, serta hidup harmonis tanpa cela. Secara literal, Islam berarti kepasrahan total kepada Tuhan, dan dalam kepasrahan itu lahirlah kedamaian (Nasution, 2002). Dengan demikian, seorang Muslim adalah pribadi yang damai bersama Tuhan, sesama manusia, maupun alam semesta. Konsepsi ini sejalan dengan sifat dasar Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin* yang menolak segala bentuk permusuhan, kekerasan, maupun syariat yang membawa kerusakan. Sebaliknya, seluruh ajaran Islam ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Al-Qur'an sebagai kitab suci juga memberikan landasan komprehensif mengenai pentingnya perdamaian global. Islam tidak hanya membatasi diri pada aspek ritual, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi (Fajrin & Taufikurrahman, 2023). Konsep dan praktik perdamaian dalam Islam dapat pula ditilik setidaknya dari dua dimensi, yakni dimensi teologis, dan historis (Asroni, 2019). Dari dimensi teologis, ada banyak ayat Al-Qur'an yang memberi petunjuk akan arti penting perdamaian, salah satunya seperti dalam Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan untuk mendamaikan kelompok yang sedang berkonflik.

Bukti teologis lainnya bahwa Islam merupakan agama perdamaian tercermin dalam asma' al-husna. Bahkan, dalam Al-Qur'an terdapat lima kali lebih banyak ayat yang mengandung nama Allah Swt. yang berorientasi keindahan (jamaliyah), daripada nama Allah Swt. yang berorientasi pada kebesaran (jalaliyah). Sedangkan dari dimensi historis, bukti bahwa Islam merupakan agama perdamaian antara lain dapat ditilik dari sejarah Nabi Muhammad saw. dan para sahabat, terutama masa khulafaur rasyidun (Asroni, 2019).

Dari uraian singkat di atas tentang Islam dan perdamaian, maka dapat dipahami bahwa politik Islam dalam konteks politik internasional dapat dimaknai sebagai aktivitas politik dan diplomasi yang tidak saja berdasarkan pada asas dan prinsip ajaran Islam,

tetapi juga harus bertujuan mewujudkan dan memelihara kedamaian dan perdamaian. Politik Islam seyogianya berperan dan berkontribusi besar bagi terbentuknya tatanan dunia yang damai dan sejahtera, sebagaimana sifat Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Apalagi dalam situasi dunia saat ini yang diwarnai dengan banyak gejolak konflik dan krisis kemanusiaan, keterlibatan peran politik Islam melalui diplomasi di berbagai tingkatan sangat penting. Perdamaian global tidak hanya tema tentang kesepakatan atau perjanjian penghentian konflik. Akan tetapi, perdamaian mempunyai makna yang lebih luas yakni tentang berbagai hal terkait dengan kemanusiaan, mulai dari segi kesejahteraan ekonomi, kesetaraan sosial, pengakuan budaya, dan lain sebagainya. Artinya, ketika nilai-nilai kemanusiaan dengan segala aspeknya terpelihara dengan baik, maka perdamaian akan terwujud.

Dalam konteks mewujudkan perdamaian global karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, umat Islam dihadapkan pada banyak tantangan global kontemporer. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, umat Islam menghadapi tantangan berat di abad ini, seperti penjajahan zionis Israel di Palestina, pemecah-belah, keterbelakangan pembangunan di banyak negara Muslim, hingga moralitas bangsa yang tergerus akibat globalisasi (Rahman, 2001).

Dari perspektif subjek, pemikiran politik Islam tidak saja tentang tema kepemimpinan, etika politik, pengaturan politik, hubungan warga negara dengan negara atau pemimpin, kedaulatan, dan hukum. Akan tetapi, politik Islam juga tentang aktor yang melakukan tindakan politik atau diplomasi. Aktor tersebut dapat bersifat individual (seperti khalifah atau kepala negara, ulama, ataupun tokoh pembaharu Islam), kelompok (seperti organisasi dakwah, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan Islam, dan lain sebagainya), maupun institusi politik (seperti partai Islam, ataupun negara Islam). Dalam artikel ini, penulis menganalisis peran politik Islam dalam perdamaian global dengan meminjam teori analisis peringkat unit (*unit level of analysis*) dari perspektif realisme struktural atau neorealisme dalam Hubungan Internasional. Berdasarkan teori ini, subjek dari politik Islam, baik individu, organisasi, negara, maupun sistem global.

KERANGKA TEORI

Teori Tingkatan Unit Analisis (*Unit Level of Analysis*)

Dalam studi politik internasional, pendekatan untuk menganalisa dinamika yang sedang berlangsung dapat menggunakan teori tingkatan unit (*unit levels of analysis*). Unit yang dimaksud dalam teori ini adalah aktor politik yang berperan aktif di dalam dinamika politik di tiap tingkatan (level). Ada tiga tingkatan analisis yang digunakan, yaitu tingkatan individual (*individual-level analysis*), tingkatan negara (*state-level analysis*), dan tingkatan sistem global (*global system-level analysis*). Tingkatan pertama adalah individu. Analisis tingkat individu mempelajari politik internasional dengan memeriksa peran manusia sebagai aktor di panggung dunia. Analisis tingkat individu dapat didekati dari tiga perspektif yang berbeda. Salah satunya adalah memeriksa sifat dasar manusia. Kedua, mempelajari bagaimana orang bertindak dalam organisasi dan tindakan orang-orang tertentu. Pendekatan ini meneliti karakteristik dasar manusia, termasuk faktor kognitif, psikologis, emosional, dan biologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Tingkatan kedua adalah negara. Analisis tingkat negara mengasumsikan bahwa karena negara merupakan aktor internasional yang paling penting, politik dunia dapat dipahami dengan baik dengan berfokus pada bagaimana negara memutuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri tidak dirumuskan oleh proses pengambilan keputusan tunggal. Sebaliknya, sifat yang tepat dari proses itu berubah sesuai dengan sejumlah variabel, termasuk jenis situasi, jenis masalah, dan faktor internal yang terlibat. Negara adalah organisasi yang kompleks, dan dinamika internal, atau domestik mereka mempengaruhi tindakan internasional mereka.

Tingkatan terakhir adalah sistem global. Analisis tingkat sistem menjadi tingkatan yang paling umum dan populer digunakan dalam menganalisis peristiwa internasional, terutama bagi analisis realisme, neorealisme, dan strukturalisme. Konsep ini merujuk kepada aktor global dengan latar sosial-ekonomi-politik di mana mereka berinteraksi. Para analis sistem percaya bahwa karakteristik spesifik masing-masing sistem menyebabkan aktornya berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi (T Rourke & A Boyer, 2006).

Sementara menurut Daniel S Pap (2002), ada lima tingkatan analisis (*five levels of analysis*) yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa peristiwa internasional. Kelima tingkatan itu adalah tingkatan individu (*individual-level*), tingkatan struktur birokrasi (*bureaucratic structure of actor-level*), tingkatan negara (*state-level*), tingkatan kawasan (*regional system-level*), dan tingkatan global (*global system-level*).

Teori Perdamaian

Kajian mengenai perdamaian pada awalnya dikaitkan sebagai kebalikan dari perang. Perdamaian didefinisikan sebagai ketiadaan perang karena studi ini dimotivasi oleh refleksi terhadap Perang Dunia Kedua dan krisis kemanusiaan yang terjadi di era setelahnya akibat bipolaritas dua negara adidaya (Matsuo, 2005). Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep perdamaian pada saat itu hanya memiliki satu makna, yaitu ketiadaan perang. Konsep perdamaian memiliki spektrum pengertian yang beragam berdasarkan pendekatan yang berbeda dalam politik internasional. Bagi kaum kapitalis, perdamaian dapat diwujudkan dengan cara kerja sama dan pengumpulan kekayaan (*accumulation of wealth*). Paham lingkungan (*green thought*) menganggap bahwa dunia akan aman dan damai jika manusia tidak merusak alam. Kaum idealis memahami perdamaian sebagai keadaan ketika negara dan individu berada dalam kebebasan, kesejahteraan, dan tidak ada ancaman. Sedangkan, liberalisme melihat bahwa perdamaian ada dalam institusionalisasi norma liberal dari ekonomi politik internasional yang berbasis pada kerja sama saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Terakhir, marxisme menghendaki tercapainya perdamaian dengan penghilangan kelas yang menjadi dasar dari penindasan melalui sebuah revolusi (Indrawan, 2015). Dari keberagaman tersebut, dapat ditarik garis spektrum perdamaian yang memiliki arti mulai dari ketiadaan perang, kelestarian lingkungan, kerja sama ekonomi, hingga kesejahteraan. Seperti dalam diskursus mengenai keamanan, referensi objek pada studi perdamaian ini ada dua, yaitu negara dan manusia. Secara ontologis, siapa yang harus ‘didamaikan’ atau hakikatnya berhak menerima perdamaian, apakah negara atau manusia.

Sementara itu, Islam juga memiliki konsep tentang perdamaian. Konsep perdamaian dalam tradisi Islam harus dilihat dalam empat konteks yang saling terkait. Pertama adalah konteks metafisik-spiritual, di mana kedamaian (*salam*) sebagai salah satu nama Tuhan yang dipandang sebagai bagian penting dari ciptaan Tuhan dan diberi nilai substantif. Kedua adalah konteks filosofis-teologis, di mana pertanyaan tentang kejahatan dibahas sebagai masalah kosmik, etika, dan sosial. Diskusi tentang teodisi di antara para teolog dan filsuf Muslim mengandung salah satu analisis paling mendalam tentang pertanyaan dasar mengenai kejahatan, ketidakadilan, kecelakaan, dan kekerasan. Ketiga adalah konteks politik-hukum, lokus yang tepat dari diskusi hukum dan hukum klasik tentang perang, pemberontakan, penindasan, dan tatanan serta kekacauan politik. Keempat adalah konteks sosio-kultural, yang mengungkapkan parameter pengalaman tentang keragaman agama dan budaya dalam

komunitas agama dan tradisi budaya lain (Al Huda, 2010). Kedua teori di atas, yaitu Teori Analisis Tingkatan Unit dan Teori Perdamaian digunakan untuk menunjukkan peran umat Islam dalam turut serta membangun dan menjaga perdamaian dunia dalam beragam bentuknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, interpretasi, dan relevansi peran dunia Islam dalam mewujudkan perdamaian global secara lebih mendalam dan komprehensif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah literatur primer maupun sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional, dan dokumen historis yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan memadukan teori *levels of analysis* dalam Hubungan Internasional dan teori perdamaian (Adlini et al., 2022). Melalui teori *levels of analysis*, penelitian ini mengkaji peran politik Islam pada tiga tingkatan, yaitu individu (tokoh-tokoh Muslim penerima Nobel Perdamaian), negara (studi kasus Indonesia), dan global (peran organisasi Islam internasional seperti OKI, Liga Arab, dan Liga Muslim Dunia). Sementara itu, teori perdamaian digunakan untuk menafsirkan makna dan praktik perdamaian dalam perspektif Islam, baik dalam dimensi teologis maupun historis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai kontribusi politik Islam dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, sekaligus menegaskan relevansinya dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.

PEMBAHASAN

Dengan populasi mencapai 2 miliar dari total penduduk dunia 8 miliar jiwa, peran umat Muslim dalam perkembangan kemajuan dunia tentunya tidak dapat diabaikan. Umat Islam menjadi populasi dengan pertumbuhan tercepat dibandingkan dengan populasi umat agama lain, dan diprediksi melampaui umat Kristen pada tahun 2050 (Population, 2024). Dengan jumlah sebanyak itu, sudah pasti banyak kontribusi yang diberikan umat Islam,

baik secara individual, maupun kelompok dalam bentuk keorganisasian internasional. Banyak tokoh dan organisasi Islam yang telah turut berkontribusi dalam program-program kemanusiaan universal untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Tingkatan Individu: Tokoh Muslim dan Nobel Perdamaian

Pada tingkatan ini, banyak tokoh muslim yang diakui kontribusi mereka pada upaya mewujudkan perdamaian dunia, baik dalam bentuk mediasi konflik, penemuan bidang ilmiah dan teknologi, pembangunan ekonomi, maupun advokasi sosial. Pengakuan diberikan bukan saja oleh dunia Islam, tetapi masyarakat internasional seperti yang terepresentasikan dengan baik dalam bentuk Penghargaan Nobel Perdamaian. Penghargaan Nobel Perdamaian (Nobel Peace Prize) adalah salah satu dari lima Penghargaan Nobel (Nobel Prize) yang dibuat oleh industrialis, penemu, dan produsen persenjataan bernama Alfred Nobel, bersama dengan penghargaan-penghargaan lainnya dalam bidang kimia, fisika, kedokteran, dan sastra. Sejak tahun 1901, penghargaan tersebut diberikan secara tahunan kepada orang-orang yang dianggap telah memberikan upaya terbesar atau terbaik bagi persaudaraan antarbangsa, penghapusan atau pengurangan angkatan bersenjata, dan bagi pelaksanaan atau promosi perdamaian.

Dalam konteks tingkatan individual (*individual-level*) ini, Penghargaan Nobel dapat dijadikan salah satu tolak ukur terhadap tokoh Muslim yang memberi perhatian dan kontribusi nyata terhadap perwujudan perdamaian. Meskipun aspek kontroversi dari pemenang Penghargaan Nobel selalu tidak dapat dihindarkan karena Penghargaan Nobel tetap bersifat subyektif meski dilakukan oleh sebuah komite yang dibentuk Parlemen Norwegia. Beberapa tokoh Muslim yang memenangkan Penghargaan Nobel antara lain:

1. Anwar Sadat (1978): Presiden Mesir menerima Penghargaan Nobel Perdamaian atas perannya dalam Perjanjian Camp David yang membawa perdamaian antara Mesir dan Israel.
2. Yasser Arafat (1994): Pemimpin Palestina yang menerima Nobel Perdamaian atas upayanya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.
3. Mohamed ElBaradei (2005): Seorang diplomat dan pengacara Mesir yang mendapatkan Nobel Perdamaian atas perannya sebagai Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan upayanya dalam mencegah penyebaran senjata nuklir.

4. Tawakkol Karman (2011): Seorang aktivis hak asasi manusia dari Yaman yang mendapatkan Nobel Perdamaian atas peranannya dalam memimpin gerakan damai selama Revolusi Yaman 2011.
5. Malala Yousafzai (2014): Aktivis pendidikan Pakistan yang mendapatkan Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam mempromosikan hak pendidikan anak perempuan.
6. Abiy Ahmed Ali (2019): Perdana Menteri Ethiopia yang mendapatkan Nobel Perdamaian atas peranannya dalam memediasi perdamaian antara Ethiopia dan Eritrea.
7. Muhammad Yunus (2006): Ekonom dan pengusaha sosial Bangladesh yang mendapatkan Nobel Perdamaian atas kontribusinya dalam mengembangkan mikrofinansial melalui Grameen Bank, membantu orang miskin untuk memperoleh akses ke layanan keuangan.
8. Muhammadu Buhari (2023): Presiden Nigeria yang dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian atas perannya dalam upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di Nigeria, terutama terkait dengan konflik bersenjata di beberapa wilayah.

Bahkan di luar para pemenang Penghargaan Nobel di atas berdasarkan kriteria yang ditentukan Komite Penghargaan Nobel dari Norwegia, sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Muslim, baik kepala negara, ilmuwan, maupun ulama kontemporer, yang tidak saja memiliki peran dan jasa besar bagi kebangkitan dan kemajuan umat Islam, tetapi juga kemaslahatan dunia secara umum namun tidak termasuk ke dalam kriteria penilaian Komite Nobel dari Norwegia tersebut. Misalnya, menurut penulis, adalah Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Salah satu kontribusi besarnya dalam perdamaian dunia adalah Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Bersama dengan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Pakistan Muhammad Ali Jinnah, dan beberapa kepala negara lainnya menginisiasi penyelenggaraan KAA yang menghimpun 29 kepala negara dan delegasi dari Asia dan Afrika dalam rangka menyikapi Perang Dingin antara Blok Barat pimpinan Amerika Serikat dengan Blok Timur pimpinan Uni Soviet. Dari pertemuan itu, terbentuklah Gerakan Non-Blok yang berpegang pada prinsip fundamental seperti kedaulatan negara, netralitas, non intervensi, dialog, kerja sama, dan perdamaian global. Negara-negara anggota Gerakan Non-Blok menolak keterlibatan keberpihakan dalam persetujuan antara Blok Barat dan Blok Timur (Wulandari, 2022).

Tingkatan Negara: Kontribusi Indonesia dalam Perdamaian Dunia

Pada tingkatan kedua ini, negara sebagai aktor politik internasional memang tidak dapat dilepaskan dari unsur individu kepala negara dalam konteks proses pembuatan kebijakan luar negeri (*making-policy process*). Namun demikian, yang menjadi fokus analisis tetap pada perilaku negara sebagai aktor yang dilihat memiliki karakter personifikatif seperti manusia. Untuk tingkatan ini, penulis mengambil studi kasus kontribusi Indonesia dalam upaya turut serta mewujudkan perdamaian, baik di dunia Islam maupun di dunia internasional. Keterlibatan aktif Indonesia di berbagai kegiatan internasional dalam kerangka kerja kemanusiaan dan perdamaian merupakan bentuk implementasi dari amanah Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...” (UUD, 1945).

Keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian telah dimulai pada tahun 1957 dalam misi perdamaian di Mesir dengan mengirimkan 557 personel (Anwar, 2014). Sejak keterlibatan dalam misi perdamaian di Mesir, pemerintah Indonesia terlibat dalam berbagai misi perdamaian di wilayah lain di mana pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia dikenal dengan Indonesian Garuda Contingent (IGC) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kontingen Garuda (Konga) (Rachmat & Ratmoko, 2020). Indonesia melalui Kontingen Garuda TNI telah melaksanakan berbagai misi di berbagai belahan dunia. Berbagai misi yang diikuti oleh Kontingen Garuda TNI telah mendapatkan banyak apresiasi terkait dengan kontribusi yang diberikan dalam kesuksesan setiap misi. Di mana seperti halnya kepemimpinan Indonesia dalam misi UNEF II sangat dihargai dalam menjaga terlaksananya perjanjian damai di antara Mesir dan Israel yang pada saat tersebut berkonflik.

Bagi Indonesia, kontribusi pasukan TNI dalam *peacekeeping operations* PBB sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia telah menjadi amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian mulai mengalami penurunan saat awal pemerintahan Presiden Soeharto hingga awal tahun 1990-an, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memaksimalkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan stabilisasi keamanan dalam negeri.

Pada masa ini, Indonesia hanya mengirimkan kontingen dalam jumlah yang tidak terlalu besar serta dengan misi yang meliputi *military observer* maupun personel pendukung lainnya. Indonesia kembali aktif mengambil bagian dalam misi perdamaian PBB pada awal tahun 1990-an di berbagai wilayah. Berdasarkan data per 2016 lalu, Indonesia melalui Kontingen Garuda TNI mengirimkan sebanyak 2.840 personel yang tergabung dalam misi *peacekeeping operations* di bawah misi UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-12 dari 124 negara anggota PBB yang berkontribusi terhadap *peacekeeping operations* yang digelar (Rachmat & Ratmoko, 2020).

Salah satu misi perdamaian di mana Indonesia telah lama menjadi kontributor dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian adalah pada United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) di wilayah Lebanon Selatan. Data yang dipublikasikan oleh UN Departement of Peacekeeping Operations (DPKO) tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi sebanyak 1.296 personel dalam misi UNIFIL sehingga menjadi negara peringkat pertama dalam jumlah pasukan yang berkontribusi di dalamnya. Saat ini Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan perannya di UNIFIL. Upaya peningkatan peran Indonesia dalam UNIFIL tersebut ditunjukkan dengan pengiriman kapal perang untuk bergabung dalam UNIFIL Maritime Task Forces.

Selain aktif mengirim pasukan perdamaian di bawah payung PBB, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam menyusun tahapan perdamaian terkait konflik di Afghanistan. Terutama pasca Perjanjian Doha tahun 2020 yang disusul dengan mundurnya militer Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021. Kontribusi positif Indonesia dalam perdamaian di Afghanistan tidak saja dilakukan secara konsultatif pihak pemerintah Afghanistan kepada Indonesia, tetapi juga membuka dan memperluas kerja sama bilateral berbagai bidang kedua negara (Muttaqin et al., 2025). Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Afghanistan tahun 2018. Kunjungan balasan dilakukan pemerintah Afghanistan yang baru terbentuk pasca mundurnya militer AS tahun 2022 (Sugara, 2021). Indonesia juga memperkenalkan model Islam wasathiyah sebagai paradigma pengelolaan negara dalam konteks hubungan Islam dan negara yang dilakukan Indonesia (Tambunan & Moenawar, 2019). Kontribusi perdamaian global lainnya yang diperankan Indonesia adalah dalam isu

kemanusiaan dan keadilan di Palestina. Indonesia, baik pemerintah maupun organisasi atau lembaga kemanusiaannya, sangat aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Suara dukungan itu selalu digaungkan pemerintah Indonesia di forum-forum multilateral. Indonesia juga memiliki Rumah Sakit di Jalur Gaza yang merupakan bantuan dari pemerintah dan umat Islam di Tanah Air. Rumah Sakit Indonesia menjadi satu-satunya rumah sakit yang dibangun negara luar Palestina di Jalur Gaza.

Tingkatan Global: Kontribusi Organisasi Islam Internasional

Pada tingkatan global, penulis mengambil beberapa representasi politik Islam dalam bentuk organisasi Islam dunia seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab (Arab League), Liga Muslim Dunia (Muslim World League), dan beberapa organisasi lainnya. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah organisasi terbesar kedua setelah PBB dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di empat benua. Organisasi ini merupakan suara kolektif dunia Muslim untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni di antara berbagai orang di dunia. Organisasi ini didirikan berdasarkan keputusan KTT bersejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijrah (25 September 1969) sebagai respons atas tindakan kriminal pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki Israel (Rehman et al., 2017).

Pada awalnya, OKI berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh Palestina, tetapi OKI sekarang memperluas fokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan cara mempromosikan dan membangun kerja sama antar-organisasi-organisasi dunia dan kerja sama antarnegara, khususnya negara Muslim. Kerja sama OKI mencakup berbagai aspek seperti, politik, masalah sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, serta perdagangan. Perubahan fokus dari OKI ini bermula ketika adanya OIC 10th Years Program of Actions yang ditetapkan berdasarkan *blueprints* pada KTT Luar Biasa kelima di Makkah Arab Saudi pada Desember 2005 (Munandar, 2024). Tindakan tersebut dilakukan seiring banyak dan meningkatnya tantangan bagi negara-negara Islam. Program tersebut menjadi titik awal OKI dalam memfokuskan kebijakannya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengupayakan penghapusan segala bentuk manifestasi dan diskriminasi terhadap Muslim. Kehadiran OKI juga dianggap sebagai pencapaian besar bagi

dunia Islam. Sebagai representasi negara-negara Islam di dunia global, OKI punya peran strategi dalam penguatan diplomasi Islam. Diplomasi Islam yang dilakukan oleh OKI sangat berbeda dengan diplomasi konvensional yang memiliki banyak kekurangan dan relatif tidak bersih dalam pelaksanaannya. Dimana mereka melakukan pemaksaan dan penekanan yang akan mengakibatkan pihak lain tunduk terhadap pihak yang melakukan penekanan. OKI secara rutin mengadakan pertemuan atau konferensi tingkat tinggi internal OKI dalam merespons suatu permasalahan atau konflik yang melibatkan negara-negara anggota OKI. Dalam OKI terdapat dua pertemuan besar, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri (Azhar, 2019).

Selain itu, OKI juga menjalin kerja sama dengan PBB sebagai organisasi terbesar pertama di dunia dan juga menjalin kerja sama dengan organisasi internasional lainnya dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan vital umat Islam serta sebagai upaya pencarian solusi untuk menyelesaikan konflik. Pertemuan dan kerja sama tersebut dilakukan dengan menggunakan diplomasi Islam dengan tujuan melindungi norma, nilai, dan tentunya umat Islam. Adapun fokus prioritas utama dari OKI seperti, koordinasi dan kolaborasi antar negara anggota, penanganan Islamophobia, dan mempromosikan dan mengutamakan kepentingan vital umat Islam di dunia dalam forum internasional.

OKI mempunyai kehormatan tunggal dalam membentuk kesatuan umat Islam dan secara aktif mewakili umat Islam. Dalam aktivitas internasional ataupun penanganan konflik dengan menanamkan nilai-nilai moralitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini OKI juga dapat memainkan peran pelengkap sebagai mitra dari organisasi internasional seperti PBB dan lainnya. Peran tersebut dimainkan oleh OKI terutama sebagai mediator antar negara atau pihak-pihak yang berkonflik (Puri & Yumitro, 2022). Peran strategis OKI yang berorientasi pada kerja sama dan perdamaian ini dapat dilihat dari dalam tubuh OKI sendiri, yang mana OKI beserta negara-negara anggota mengupayakan berbagai cara untuk dapat menciptakan perdamaian yang dilakukan dengan beberapa hal, antar lain seperti: Pertama, mengadakan KTT dan pertemuan lain antarnegara anggota dengan fokus pembahasan menciptakan perdamaian dan menyejahterakan umat Islam di seluruh dunia. Sebagai sebuah organisasi internasional yang pada awalnya memfokuskan diri untuk memperhatikan masalah politik, khususnya masalah Palestina, OKI dalam perkembangannya telah mengubah dirinya menjadi sebuah wadah kerja sama bagi negara-negara Islam dalam segala aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, masyarakat, budaya, dan ilmu pengetahuan (Abadi & Fahmi, 2023).

OKI menyelenggarakan KTT ke-10 antara Kepala Negara pada 11-17 Oktober 2003 di Putrajaya, Malaysia. Pertemuan ini sebagai suatu upaya konkret dalam restrukturisasi Sekretariat OKI, yang berfokus dalam empat aspek, yaitu penyederhanaan struktur, peningkatan keuangan, metodologi, dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya, pada KTT Luar Biasa ke-3 yang dilaksanakan pada 7-8 Desember 2005 di Makkah, Arab Saudi telah memenuhi keinginan OKI yang dituangkan dalam OIC 10-years Program of Actions dan Macca Declaration, yang mana keduanya membawa OKI ke dalam restrukturisasi dan reformasi dalam tubuh OKI. OIC 10-years Program of Actions menandai dimulainya perkembangan fokus OKI yang semula hanya memiliki fokus pada masalah politik, menjadi memiliki berbagai fokus seperti, HAM, sosial, dan ekonomi. Program tersebut membahas tantangan politik dan ilmu pengetahuan serta isu-isu yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan, ekonomi, sosial, dan ilmiah, dengan tujuan untuk menutup kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat (Abadi et al., 2024). Hal tersebut dilakukan dengan harapan mampu menangani berbagai keprihatinan, termasuk upaya untuk menanamkan cita-cita toleransi, penghapusan kekerasan, penghapusan ekstremisme, dan terorisme, serta pemberantasan Islamophobia.

Adapun implementasi dari OIC 10-years Program of Actions yaitu dibentuknya The Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) sebagai suatu badan yang bekerja secara independen dalam masalah hak asasi manusia yang berfokus pada kerja sama negara anggota OKI dalam memprioritaskan isu HAM. IPHRC ini dibentuk berdasarkan makna dan isi dari Piagam OKI yang telah disetujui dalam KTT Islam ke-111 yang bertempat di Dakar, Senegal pada tanggal 13-14 Maret 2008. Dalam kiprahnya IPHRC sangat konsisten mengupayakan tercapainya nilai-nilai HAM dan secara terbuka menerima ide dan saran dari negara-negara anggota yang berkaitan dengan kepentingan Islam dan penegakan HAM. Kerja sama IPHRC ini terlihat dari berbagai periode sesi pertemuan yang mana pada setiap periode sesi terdapat negara-negara anggota yang menjadi komisioner IPHRC. Pada periode 2012-2018, Indonesia sebagai komisariss IPHRC telah berhasil menyelenggarakan sesi inaugural dari IPHRC pada 20-24 Februari 2012 dan pada tanggal 4-6 Desember 2012 OKI juga telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Menteri Luar Negeri OKI dengan tema “*Role of Women in Development*” (Hidayat, 2014). Dalam konferensi tingkat menteri yang diadakan di Jakarta tersebut telah melahirkan Jakarta Declaration yang berisi langkah-langkah dalam peningkatan dan penguatan implementasi dari berbagai kebijakan dan komitmen yang telah dibentuk, contohnya penetapan indikator evaluasi dan pengawasan terhadap OIC Plan of

Action for the Advancement of Women. Selain OKI, Liga Arab (Arab League) menjadi organisasi kawasan di Timur Tengah yang juga memainkan banyak kontribusi terhadap pembangunan perdamaian dan kesejahteraan global (Ahmad, 2016). Organisasi ini merupakan inisiasi negara-negara Timur Tengah sebagai dampak Perang Dunia II sebagai wadah regionalisme untuk memenuhi kepentingan politik, budaya, sosial, ekonomi, hingga mediasi jika terjadi perselisihan di antara negara-negara Arab maupun pihak ketiga. Inisiasi ini mendapat dukungan dari Inggris karena kepentingan Inggris agar kekuatan-kekuatan di Timur Tengah menjadi sekutu (Rimapradesi & Surwandono, 2022).

Meskipun demikian, negara-negara Arab justru melihat dukungan Inggris ini sebagai motivasi untuk segera membentuk kesatuan Pan-Arab yang akan meningkatkan dukungan bagi orang-orang Arab Palestina. Proses ini memuncak pada 1944 saat Protokol Alexandria, sebagai cetak biru pendirian Liga Arab, ditandatangani lima negara, yaitu Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Transjordan (kini Yordania), Yaman, dan Arab Saudi. Sampai akhirnya, beberapa bulan sebelum Perang Dunia II usai, pada 22 Maret 1945 kelima negara Arab itu resmi mendirikan Al-Jami'a Al-'Arabiyah atau Liga Arab di Kairo.

Pada awalnya, Liga Arab memberikan fokusnya pada pembebasan negara-negara Arab dari kolonialisme serta mencegah komunitas Yahudi di Palestina untuk mendirikan negara Israel. Hal ini kemudian berkembang pada perjanjian kerja sama militer dan ekonomi (Barnidge, 2018). Delapan tahun setelah pembentukan organisasi regional tersebut, keanggotaannya bertambah mulai dari Libya (1953); Sudan (1956); Tunisia dan Maroko (1958); Kuwait (1961); Aljazair (1962); Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (1971); Mauritania (1973); Somalia (1974); Organisasi Pembebasan Palestina (PLO, 1976); Djibouti (1977); dan Komoro (1993).

Dalam perkembangan selanjutnya, Liga Arab mengembangkan ruang lingkungannya pada program ekonomi, budaya, dan sosial. Tahun 1959, Liga Arab mengadakan kongres perminyakan Arab pertama. Tahun 1964, Liga Arab mendirikan cabang Organisasi Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmiah (The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization/ALECSO). Juga pada tahun yang sama, Liga Arab memberikan status pengamat kepada The Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Palestina, meskipun hal itu mendapat penolakan dari Jordan. Tahun 1976, status ini ditingkatkan menjadi keanggotaan penuh (Heath-Brown, 2015). Berdasarkan

Piagam Liga Arab, tujuan utama organisasi ini adalah “Penguatan hubungan antara negara-negara anggota, koordinasi kebijakan mereka untuk mencapai kerja sama antara mereka dan untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara Arab”. Piagam Liga Arab juga melarang para anggota untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. Liga Arab telah aktif dalam membantu dunia Arab mengembangkan perekonomian dan budaya, sekaligus menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik, baik di dalam liga maupun dari eksternal. Organisasi ini berusaha untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul antara negara-negara Arab, dan untuk memperbaiki citra keseluruhan negara-negara Muslim di dunia saat ini (Citaristi, 2022).

Organisasi Liga Arab memiliki kesempatan untuk memainkan peran diplomatik yang signifikan dalam mendorong status kenegaraan Palestina di PBB dan pemberontakan di banyak negara Arab di awal tahun 2010-an. Beberapa pengamat memuji tindakan Liga Arab selama revolusi 2011 di Libya, di mana Liga Arab mendukung penggulingan Muammar al-Qaddafi. Akan tetapi yang lain mengkritik diplomasi Liga Arab yang gagal di Suriah. Organisasi lain yang juga berperan dan berkontribusi dalam perdamaian global adalah Liga Muslim Dunia (Muslim World League), atau juga sering dikenal dengan Robithoh ‘Alam Islami. Organisasi yang didirikan pada 1962 berdasarkan hasil Kongres Umum Islam di Makkah al-Mukarromah ini bertujuan berpartisipasi terhadap sistem internasional yang berlangsung di bawah PBB melalui seruan pada dunia untuk bersungguh-sungguh mencapai kebahagiaan umat manusia, tidak merusak urusan siapa pun, menyatukan umat Islam, dan menghilangkan faktor-faktor disintegrasi umat Islam maupun umat manusia keseluruhan (Lundgren, 2020). Begitu pun dengan beberapa organisasi Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IsDB), International Islamic Federation of Student Organisation (IIFSO), International Union of Muslim Scholars (IUMS), dan International Islamic Committee for Woman and Child (IICWC) yang keseluruhannya memiliki tujuan dan program dalam pembaangunan dan kesejahteraan sosial umat manusia, terutama masyarakat Islam dunia.

KESIMPULAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil’alamin* memiliki banyak ajaran yang mendorong umatnya untuk turut serta mewujudkan perdamaian di dalam kehidupan manusia. Hal ini menjadi landasan bagi politik Islam untuk melakukan diplomasi di dunia internasional.

Peran politik Islam dalam perdamaian global dibagi pada tiga tingkatan, yaitu tingkatan individual, tingkatan negara, dan tingkatan global. Pada tingkatan individual menunjukkan banyak tokoh-tokoh Muslim yang turut serta dalam memelihara perdamaian di dunia. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan adalah Penghargaan Nobel Perdamaian, meskipun penghargaan ini tidak lepas dari sorotan kontroversial. Banyak tokoh Muslim baik kepala negara, maupun cendekiawan yang telah meraih penghargaan dari Norwegia tersebut.

Pada tingkatan kedua yaitu negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak berkontribusi dalam upaya mewujudkan dan memelihara perdamaian di dunia. Mulai dari konflik di Afghanistan, isu kemanusiaan dan keadilan di Palestina, hingga kepesertaan dalam pasukan penjaga perdamaian (*peacekeeping forces*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di berbagai negara yang dilanda konflik. Pada tingkatan terakhir yakni internasional, tentunya politik Islam yang paling representatif dalam perdamaian global adalah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). OKI menjadi satu-satunya wadah organisasi yang mempertemukan semua negara Islam dan negara Muslim. OKI dibentuk pada tahun 1969 pada awalnya sebagai respons dunia Islam terhadap aksi kriminal yang dilakukan kelompok zionis Israel membakar Masjid Al-Aqsha di Palestina. Dalam perkembangannya, OKI mengikuti perkembangan dinamika dunia internasional dan dunia Islam khususnya, serta meluaskan fokus perhatian dan kerja samanya dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, hingga Hak Asasi Manusia (HAM). Selain OKI, banyak organisasi Islam yang juga berkontribusi pada kemaanusiaan universal seperti Liga Arab, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank (IsDB), dan International Islamic Federation of Student Organisation (IIFSO).

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, F. A., & Fahmi, R. (2023). Peran Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dalam Penyelesaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 110–119.
- Abadi, F. A., Fahmi, R., & Sarwandono. (2024). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai Alat Diplomasi dalam Penyelesaian Konflik Israel—Palestina. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), Article 4. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.1062>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

- Ahmad, A. Y. (2016). *Introduction to a general reading of the Arab scene*.
<https://online.ucpress.edu/caa/article/9/4/493/26013/Introduction-to-a-general-reading-of-the-Arab>
- Al Huda, Q. (2010). *Crescent and Dove: Peace and Resolution Conflict in Islam*. US Institute of Peace.
- Anwar, D. F. (2014). Indonesia's Peacekeeping Operations: History, Practice, and Future Trend. In C. Aoi & Y.-K. Heng (Eds.), *Asia-Pacific Nations in International Peace Support and Stability Operations* (pp. 189–210). Palgrave Macmillan US.
https://doi.org/10.1057/9781137366955_8
- Asroni, A. (2019). Islam dan Bina Damai: Ikhtiar Membumikan Doktrin Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3(2), 222–240.
<https://doi.org/10.22437/titian.v3i2.8178>
- Azhar, H. (2019). The OIC and Conflict Resolution: Norms and Practical Challenges. In M. J. Petersen & T. Kayaoglu (Eds.), *The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights* (pp. 219–244). University of Pennsylvania Press.
<https://doi.org/10.9783/9780812295948-010>
- Barnidge, R. P. (2018). Anti-Zionism, *Jus Cogens*, and International Law: The case of the Banjul Charter and Arab Charter. *The Journal of the Middle East and Africa*, 9(1), 77–92. <https://doi.org/10.1080/21520844.2018.1449796>
- Citaristi, I. (2022). League of Arab States. In Europa Publications, *The Europa Directory of International Organizations 2022* (24th ed., pp. 670–679). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003292548-123>
- Heath-Brown, N. (2015). League of Arab States. In N. Heath-Brown (Ed.), *The Statesman's Yearbook 2016* (pp. 73–73). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-57823-8_107
- Hidayat, A. (2014). Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2(03). <https://doi.org/10.30868/am.v2i03.125>
- Indrawan, J. (2015). *Studi Strategis Dan Keamanan*. Nadi Pustaka.
- Lundgren, M. (2020). Causal mechanisms in civil war mediation: Evidence from Syria. *European Journal of International Relations*, 26(1), 209–235.
<https://doi.org/10.1177/1354066119856084>
- Matsuo, M. (2005). *Peace and Conflict Studies: A Theoretical Introduction*. Keisusiha.

- Megawati Fajrin & Taufikurrahman. (2023). Hakikat dan Prinsip Islam Rahmatan Lil Alamin. *El-Fata: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 3(01), 1–12. <https://doi.org/10.36420/eft.v3i01.218>
- Munandar, A. (2024). Dynamics of Islam and Politics in the Middle East region:(Analysis of Conflicts, Roles, and Future Challenges). *An-Nur International Journal of Islamic Thought*, 2(1), 23–33.
- Muttaqin, F. F., Munandar, A., Susanti, E., Gutierrez, Y. H. R., & Riaz, F. (2025). Cultural Diplomacy in Global Governance: Reimagining Indonesia’s Soft Power Through Nahdlatul Ulama’s Islam Nusantara Paradigm. *Jurnal Indo-Islamika*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47346>
- Nasution, H. (2002). *Harun Nasution Ensiklopedi Islam Indonesia, II (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 475*. Djambatan.
- Population, W. (2024). *World Population Review*, “Muslim Population by Country 2024,” *World Population Review*, 2024, diakses pada 24 Mei 2024 dari https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim_population-by-country.
- Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Sospol*, 8(1), 96–108. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717>
- Rachmat, A. N., & Ratmoko, K. (2020). *Determinan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Peningkatan Partisipasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa: Studi Terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009*. 1(1), 4–9.
- Rahman, S. (2001). *Yusuf Al Qadarwi Islam Abad 21: Refleksi Abad 20 Dan Agenda Masa Depan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rehman, J., Dickinson, M., & Shahid, A. (Eds.). (2017). *Organisation of Islamic Cooperation*. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004339033_016
- Rimapradesi, Y., & Surwandono, S. (2022). Inkonsistensi Diplomasi Islam di Dalam Liga Arab. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 7(2), 105. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8501>
- S Pap, D. (2002). *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*. Longg Man Pearson.

- Sugara, R. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1).
- T Rauke, J., & A Boyer, M. (2006). *Internatinal Politics in The World Stage*. McGraw-Hill.
- Tambunan, A., & Moenawar, M. G. (2019). *Islam wasathiyah: Solusi Indonesia untuk perdamaian Afghanistan* (T. Septayuda & M. Nasucha, Eds.). Majelis Ulama Indonesia. <https://eprints.uai.ac.id/1470/>
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar RI 1945, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- Wulandari, A. (2022). Dari Mesir hingga Aljazair: Jalan Panjang Diplomasi Indonesia Menuju Konferensi Asia Afrika Kedua (1955-1965)Dua (1955-1965). *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 61–84. <https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.263>